

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal, Tesis, dan/atau Skripsi

- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R., & Yusdita, E. E. (2016). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System. *InFestasi*, 12(2), 203-216.
- Diamastuti, E. (2016). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304.
- Finardi, M. N. H. (2020). *Tinjauan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Serpong*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- HALIDA, M. N. (2013). *Pelaksanaan pengawasan pajak penghasilan oleh PPAT dari persewaan tanah dan/atau bangunan di Kota Makassar*. Doctoral dissertation. Universitas Hasanudin.
- Hasanah, N., & Indriani, S. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8(1), 17-35.
- Kesuma, A. I. (2011). PPh Final, Memudahkan atau Membebani. Sebuah Tinjauan dari Sisi Wajib Pajak. In *Jurnal Forum Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Mukhlis, I., & Simanjutak, T. H. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jurnal Magister Akuntansi*. Universitas Kristen Maranatha.
- Nurmantu, S., & Mas Rasmini, S. E. (n.d.). *Sejarah dan definisi pajak*. Repository Universitas Terbuka.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan (Edisi ke-3)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oktaria, B. (2004). *Evaluasi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Palangka Raya*. Doctoral dissertation. Petra Christian University.

- Pangkey, M. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Rahati, M., Kahar, S., & Subiyanto, S. (2015). Analisis Perubahan Zona Nilai Tanah Kaitannya dengan Banjir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(1), 117-128.
- RAPAR, V. (2005). *Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat*. Doctoral dissertation. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Rini, D. P. (2020). *Tinjauan kepatuhan pengawasan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Surabaya*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sarjono, B. (2018). Mitigasi Risiko Perpajakan melalui Pengampunan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(02), 201-210.
- Sembiring, I. E. (2020). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system oleh wajib pajak UKM di Kota Medan (studi kasus di KPP Pratama Medan Petisah)*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Suharsono, A. (2014). *Modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Suhendar, I. S. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 1(01).
- Tarjo, T., & Kusumawati, I. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 10(1).
- Ubaidillah, R. B. (2019). *Menguak kepatuhan pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan (studi kasus KPP Pratama Pamekasan)*. Sumenep: Universitas Wiraraja.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.

2. Dokumen Publik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2009 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Sumber lainnya

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik daerah Kecamatan Gayamsari 2021. <https://semarangkota.bps.go.id/publication/2021/12/27/684c710991f6989c653a9057/statistik-daerah-kecamatan-gayamsari-2021.html>

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik daerah Kecamatan Genuk 2021. <https://semarangkota.bps.go.id/publication/2021/10/04/946afa738719752c594b2f8c/-statistik-daerah-kecamatan-genuk-2021.html>

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik daerah Kecamatan Pedurungan 2021. <https://semarangkota.bps.go.id/publication/2021/10/04/4223ab0431d7715976321b5c/-statistik-daerah-kecamatan-pedurungan-2021.html>

- Direktorat Jenderal Anggaran. (2019). Informasi APBN 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf>
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. (30 Januari 2020). Realisasi APBN per 31 Desember 2019. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3155-realisasi-apbn-per-31-desember-2019.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Arti kata manusia*. Diakses tanggal 29 Januari 2022, dari <https://kbbi.web.id/pribadi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Arti kata pribadi*. Diakses tanggal 29 Januari 2022, dari <https://kbbi.web.id/manusia>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Arti kata patuh*. Diakses tanggal 25 Februari 2022, dari <https://kbbi.web.id/manusia>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). Diumumkan dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847.
- Kusnandar, Viva Budi. (19 November 2021). *PDRB Kota Semarang terbesar di Jawa Tengah pada 2020*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/19/pdrb-kota-semarang-terbesar-di-jawa-tengah-pada-2020>
- Kokasih, Belinda. (26 Februari 2019). *Berapa tax ratio ideal Indonesia*. Vibiznews. <https://www.vibiznews.com/2019/02/26/berapa-tax-ratio-ideal-indonesia/>
- Kota Semarang*. (2021). Wikipedia. Diakses tanggal 28 November 2020, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
- OECD. (2021). Revenue statistics in Asia and the Pacific 2021 — Indonesia. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Ramalan, Suparjo. (4 November 2020). *Ternyata UMP dan harga tanah di Indonesia paling mahal di Asean*. okefinance. <https://economy.okezone.com/read/2020/11/04/320/2304051/ternyata-ump-dan-harga-tanah-di-indonesia-paling-mahal-di-asean>
- Target dan realisasi pajak, 2007-2021**. (n.d.). lokadata. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2021-1603086339>
- Tobing, Letezia. (13 September 2013). *Mengenai benda bergerak dan tidak bergerak*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712>